

**SELF CENSORSHIP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
MEDIA MASSA****Artini**

Dosen STIKOM London School of Public Relations, Jakarta.
(Naskah diterima melalui e-mail 13 Desember 2010, disetujui terbit 6 April 2011)

ABSTRACT

When the press faced a choice to determine the appropriate event for the news, their obligation is not only just present the facts, but also the truth and the effects of the news. This is the importance of journalists' self censorship and social responsibility to measure and assess the meaning of reporting. The measurement of self censorship itself is self conscience and the ethic of press as their moral grip. This research aims to describe the extent of self-censorship among the media in reference to the press ethics, conscience and social responsibility in media coverage. The perspective of meta-analysis was being used in this research by utilizing the results from existing research of STIKOM LSPR 2009 students, the findings of complained cases from Indonesia Press Council (Dewan Pers) 2001-2007, and the results of group discussion between Indonesian dan Australian journalists on 8-11 November 2010 in Canberra and Sydney. The results of this research showed that journalists prefer to play their role as media demand and industrial markets. Accordingly, there are many media irrelevances intentionally. The implication of this research was the element of self censorship should be inherent as journalists' intellectual process in playing their role as the spearhead of the mass media and its first loyalty to the truth and to citizens.

Key words : *Self censorship, press ethic, social responsibility of media*

ABSTRAK

Ketika pers dihadapkan pada pilihan untuk menentukan peristiwa-peristiwa yang tepat untuk dijadikan berita, kewajiban mereka tidak hanya untuk menyajikan fakta, namun juga kebenaran dan dampak dari berita tersebut. Di sinilah pentingnya sensor pribadi dan tanggung jawab sosial dari jurnalis untuk mengukur dan menilai arti dari sebuah laporan. Pengukuran sensor pribadi itu sendiri didasarkan pada kesadaran pribadi dan kode etik pers sebagai pegangan moral mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat sensor pribadi dalam media mengacu pada etika pers, hati nurani, dan tanggung jawab sosial dalam liputan media. Penelitian ini menggunakan perspektif meta-analisis dengan memanfaatkan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh mahasiswa STIKOM LSPR 2009, temuan kasus dari Dewan Pers 2001-2007, and hasil dari FGD antara jurnalis-jurnalis Indonesia dan Australia pada tanggal 8-11 November 2010 di Canberra dan Sydney. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jurnalis cenderung untuk memainkan fungsinya berdasarkan permintaan media dan kebutuhan pasar. Sejalan dengan itu, ada banyak media yang dengan sengaja bertindak tidak relevan. Impikasi dari penelitian ini yaitu elemen dari sensor pribadi harus menyatu dengan proses intelektualisasi jurnalis dalam memainkan fungsinya sebagai ujung tombak dari media massa dan kesetiannya pada kebenaran dan masyarakat.

Kata-kata kunci: *self censorship, etika pers, tanggungjawab sosial media*

PENDAHULUAN

Pengaduan atau keluhan anggota masyarakat, termasuk pejabat pemerintahan, mengenai pemberitaan yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan yang masuk ke Dewan Pers setiap tahun terus bertambah. Data tahun 2001-2007 tercatat 1265 kasus yang masuk ke Dewan Pers. Sebaliknya, pengaduan dari kalangan pers sendiri, termasuk wartawan, pimpinan perusahaan dan organisasi wartawan mengenai terjadinya tindak kekerasan atau tekanan bahkan pembunuhan oleh masyarakat atau aparat negara, juga terus meningkat. Sementara itu, Dewan Pers juga menampung berbagai keluhan atau pengaduan masyarakat mengenai tingkah laku wartawan atau media pers yang tidak lazim atau melanggar etika pers.

Belakangan di era reformasi, media baru bermunculan, namun tidak menunjukkan perkembangan bisnis yang memadai, bahkan ada “pers liar” yang terbit tanpa identitas yang jelas, menjadi tempat bersarangnya orang-orang yang mencoba mencari keuntungan, dengan mengatasnamakan sebagai wartawan. Di pihak lain muncul juga penerbitan pers yang tidak bertanggungjawab, yaitu menggaji wartawannya secara tidak memadai atau bahkan tidak memberi gaji, dan membiarkan serta mendorong wartawannya menggunakan kartu pers untuk mencari uang dan fasilitas.

Menyikapi sekitar 1265 pengaduan para pihak atas pemasalahan pemberitaan dapat diproyeksikan bahwa sejumlah pemberitaan media massa dinilai bukan karya jurnalistik, tapi berkategori kriminal yang berarti dapat diproses sebagai perkara pidana. Di sisi lain, sejumlah berita karya jurnalistik berpotensi mengandung pencemaran nama baik, karena sebagian besar wartawan dan pers tidak memahami UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kunci keberhasilan industri pers adalah “*only the knowledge journalist can provide the knowledge for the knowledge society*”. Dan bagi pers profesional berlaku ketentuan profesi: “lebih baik mempolisi diri sendiri daripada berurusan dengan polisi. Dalam konteks ini, peran *self censorship* menjadi unsur penting dalam proses intelektual media massa menjalankan tugas dan fungsi sosialnya (Sabam Leo Batubara, 2007).

Wartawan adalah ujung tombak media. Dari sisi internal media, wartawan merupakan profesi yang dituntut untuk memenuhi tiga kepentingan yakni organisasi media, masyarakat dan industri/pasar. Sebagai individual, maka sosok wartawan tidak bisa lepas dari latar belakang pendidikan, lingkungan dan organisasi media, termasuk dalam menentukan pola pemberitaan yang akan dimuat di media. Dengan demikian, pemberitaan pada hakikatnya tidak bisa lepas dari faktor individu atau sipembuat berita yang mempunyai subjektivitas sendiri dalam membuat sebuah berita. *Self censorship* merupakan bentuk proses seleksi atau sensor diri secara intelektual dalam diri wartawan ketika dia dihadapkan pada pilihan untuk semua pihak. Dalam konteks ini, sayangnya pengetahuan dan pemahaman sebagian besar wartawan Indonesia terhadap Kode Etik masih jauh dari memadai.

Bagaimana refleksi pelaksanaan *self censorship* di kalangan wartawan ini, dapat dilihat pada sejauh mana wartawan menaati Kode Etik Jurnalistik. Ada dua faktor penyebab kelalaian dalam penataan kode etik yakni faktor ketidaksengajaan karena tingkat profesionalitas yang belum memadai seperti tidak teliti dalam membuat berita, tidak melakukan pengecekan ulang, kurang mampu meramu berita, kemalasan mencari bahan, pemakaian data lama, pemilihan kata yang kurang tepat, tekanan *deadline*, pemahaman Kode Etik sangat terbatas. Faktor kedua yaitu kesengajaan antara lain meski sudah tahu kode etik, tapi masih punya niat jahat atau niat kurang baik, persaingan pers sehingga berani membuat berita yang melanggar Kode Etik, atau

hanya menjadikan pers sebagai topeng untuk perbuatan kriminal. Beberapa contoh kasus yang pernah terjadi akibat kurangnya *self censorship* adalah menggunakan sumber imajiner, korban asusila anak dimuat identitas dan fotonya, tidak faham makna *off the record*, tidak memperhatikan kredibilitas narasumber, melanggar hak properti pribadi, menyiarkan gambar ilustrasi sembarangan, wawancara fiktif, tidak memakai akal sehat, sumber berita tidak jelas, tidak melayani hak jawab secara benar, atau membocorkan identitas narasumber (Sukardi, 2007).

Tahun 2000, surat kabar Kompas mendirikan Tim Ombudsman yang tujuannya bukan hanya untuk *self censorship* tapi juga *self regulatory*. Dengan maraknya kebebasan pers dan euforia reformasi, maka gampang sekali timbul protes masyarakat terhadap isi surat kabar. Pers harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat, sehingga perlu semacam lembaga *self censorship*. Meski demikian, sensor diri bukanlah satu-satunya alasan utama menyelenggarakan sebuah tim ombudsman, karena tim ini justru lebih memfokuskan akibat pemberitaan yang timbul dengan kepentingan masyarakat termasuk narasumber (St.Sularto, 2001).

Penerapan *self censorship* sebagai rambu-rambu atau *signal* dalam liputan media juga bergantung pada sistem pers yang dipilih di sebuah negara. Media Australia melihat *self censorship* sebagai suatu elemen yang secara otomatis sudah melekat dalam diri wartawan profesional, karena wartawan sudah diberi kepercayaan penuh untuk mempertimbangkan baik buruknya akibat pemberitaan tersebut. Bagi wartawan Australia, yang penting adalah kejujuran, melaporkan apa adanya, dan melakukan keseimbangan dalam liputan. Kondisi ini dimungkinkan karena siapa pun yang akan masuk ke dunia jurnalistik, dengan berbagai latar belakang, maka ia harus masuk “karantina pendidikan jurnalistik”.

Jika melihat berbagai kasus yang menerpa kehidupan wartawan itu sendiri, seperti tindak kekerasan bahkan pembunuhan, menunjukkan betapa pentingnya *self censorship* bagi wartawan dan media dalam menjalankan tugasnya. Artinya, apa pun sistem yang berlaku serta aturan yang dapat melindungi wartawan, maka wartawan itu sendiri yang perlu mempertimbangkan konsekuensi di balik tulisannya.

Tinjauan Literatur

Penelitian mengenai etika pers, hati nurani dan tanggungjawab sosial media sudah banyak dilakukan, namun lebih sering dikaitkan dengan sistem pers yang berlaku serta bagaimana wartawan melakukan *framing* dalam pemberitaannya. Analisis *framing* untuk mengetahui keberpihakan media pada hakikatnya juga merupakan bagian *self censorship* wartawan dan media itu sendiri dalam mewujudkan apa yang menjadi agenda media.

Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan sejumlah mahasiswa STIKOM LSPR pada tahun 2009 yang menyoroti dunia pers dari berbagai perspektif, mulai dari masalah etos kerja wartawan, komunikasi interpersonal redaktur dan reporter sampai agenda tersembunyi di balik suatu liputan : 1) Naurissa Bissini (2009): *Etos Kerja Wartawan Senior (Studi Kualitatif pada wartawan Media Cetak)*. Saat ini kualitas wartawan di Indonesia semakin dipertanyakan akibat banyaknya pelanggaran kode etik jurnalistik dan pengaduan di Dewan Pers. Kualitas wartawan saat ini dinilai menurun karena kurangnya idealisme pers pada wartawan, selain akibat tekanan pemodal yang terlalu mencampuri kebijakan redaksi sehingga mengurangi kebebasan wartawan dan media. Hasil penelitian. menunjukkan bahwa wartawan senior masih memiliki idealisme

pers dan terus memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia serta masih aktif dalam dunia jurnalistik di usianya yang tidak muda lagi. Dengan metode penelitian kualitatif, hasil wawancara mendalam dengan lima wartawan senior sebagai narasumber, hasil penelitian menunjukkan bahwa etos kerja wartawan senior dipengaruhi oleh motivasi kerja dan aplikasi nilai ibadah dalam pekerjaan serta komitmen tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat. Untuk menjadi wartawan profesional, maka seorang wartawan harus memenuhi kode etik, ikut dalam organisasi kewartawan, serta bekerja sesuai standar jurnalistik profesional dan independen.; 2) Maria Angela Kemalaningrum (2009): *Penerapan Konsep Rhetorical Sensitivity dalam Komunikasi Interpersonal di Ruang Redaksi* Masalah etos kerja dan profesionalitas wartawan juga dikuatkan dalam proses seleksi berita di ruang redaksi di majalah Fitness Indonesia. Di sini juga terjadi hubungan atau komunikasi interpersonal sehingga terjadi keterbukaan antarredaksi. Hasil penelitian berdasarkan pendekatan studi kasus terungkap bahwa hubungan interpersonal antarredaksi akan memberi warna sendiri dalam proses seleksi untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan pasar. Dalam persaingan media, maka rapat redaksi harus senantiasa memperhatikan kebutuhan dan tuntutan industri.; 3) Novita Sari (2009): *Proses Pemilihan berita Utama dalam Media Cetak (Studi deskriptif pada Harian Umum Warta Kota)*, melakukan penelitian mengenai surat kabar Warta Kota dalam proses pemilihan berita sebagai *headline*. Kedekatan internal media juga didukung kepentingan media dalam upaya meningkatkan jumlah pembaca. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan redaktur pelaksana dan redaktur masing-masing *desk*, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat tahap dalam pemilihan *headline* agar dapat bersaing dengan media lain untuk merebut pembaca. Tahapan itu mulai dari pemilihan isu hangat dan pemilihan narasumber sampai ke perhitungan layak siar dan laku dijual.; 4) Clemene Teja (2009): *Analisis Pemberitaan Surat Kabar (Studi Deskriptif Pembunuhan di Surat Kabar Lampu Hijau periode 1-19 Juli 2009)* Dalam kaitan merebut pembaca juga, Lampu Hijau juga memiliki kiat tersendiri, terutama dalam pemberitaan masalah pembunuhan. Berdasarkan kategorisasi pemberitaan, berita pembunuhan dan tindakan kekerasan merupakan “alat jualan” merupakan berita yang paling laku. Namun demikian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa surat kabar Lampu Hijau dalam setiap pemberitaan mengenai pembunuhan tetap memperhatikan akurasi meski lebih menekankan berita yang berorientasi konflik.; 5) Tengku Dang Raissa Estha (2009): *Analisis Framing Teks Surat Kabar (Studi Deskriptif Pemberitaan Pemilu Presiden 2009 pada Headline SK Kompas Periode 16 Juni – 5 Juli 2009)*. Konsep akurasi juga menjadi pegangan surat kabar Kompas dalam pemberitaan mengenai Pemilu Presiden 2009. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa setiap peristiwa yang diliput media termasuk konflik politik yang melibatkan tiga pasangan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2009 tentu tidak bisa lepas dari kepentingan media juga, yang tercermin pada bagaimana pembingkaiannya. Pembingkaiannya atau *framing* ini adalah proses yang melekat dalam media massa termasuk harian Kompas pada periode 16 Juni – 5 Juli 2009. Peneliti menggunakan metode analisis *framing* Wolfsfeld dengan tiga pertanyaan kunci yakni *how did we cover this conflict in the past, what is the newsworthy of the conflict dan who are the good guys?* Hasil penelitian menunjukkan media massa sangat dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan, serta latarbelakang media itu sendiri, sehingga pemberitaannya terkesan lebih memihak dan subjektif. Ini terlihat cara pemberitaan Kompas yang cenderung lebih menonjolkan sisi positif Jusuf Kalla. Dalam pemberitaannya, visi misi serta pandangan-pandangan Jusuf Kalla terlihat lebih menonjol

dibanding kandidat lainnya. Penelitian ini lebih menekankan masalah agenda peliputan yang dilihat dengan kaca mata *framing* secara kuantitatif sehingga yang terlihat adalah bagian-bagian penonjolan atau frekuensi pemberitaannya. Pemilihan *angle* berita yang kemudian berkembang menjadi *framing* pada hakikatnya tidak bisa lepas bagaimana kacamata wartawan sendiri dalam melihat suatu peristiwa. ; 6) Theresia Hanni Christania (2009): *Penggunaan Konsep Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Konflik di Masyarakat Multikultur (Studi Komparatif Pemberitaan Konflik Pembentukan Provinsi Tapanuli Periode Februari 2009 di Harian Kompas dan Republika* Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan elemen atau unsur nilai berita, maka unsur konflik menjadi nilai berita yang hangat dan laku dijual, termasuk kasus konflik pembentukan Provinsi Tapanuli di Harian Kompas dan Republika. Jurnalisme damai adalah konsep peliputan yang dapat menyampaikan sisi nilai-nilai kedamaian dalam peristiwa konflik. Banyak kasus konflik termasuk tindak kekerasan seperti tawuran antarwarga justru menjadi lebih panas dengan adanya pemberitaan yang cenderung memojokkan salah satu pihak. Dengan metode penelitian analisis isi kuantitatif terhadap berita konflik Tapanuli periode Februari 2009, peneliti menemukan fakta bahwa kedua koran seperti Kompas dan Republika mempunyai agenda yang berbeda dalam pemberitaan kasus konflik pembentukan Provinsi Tapanuli. Ini terkait dengan visi dan misi media serta agenda media. Namun, peneliti melihat bahwa dengan jurnalisme damai maka kedua media pada hakikatnya mampu menyajikan berita secara seimbang dan objektif. Penelitian ini hanya memfokuskan pada agenda media dalam pemberitaan dengan menggunakan tolok ukur konsep jurnalisme damai.; 7) Silmy Kania Dewi (2009): *Peran Redaktur dalam Proses Produksi Berita (Studi Deskriptif pada Majalah Girlfriend Indonesia)* menyimpulkan bahwa dalam proses produksi berita, maka peran redaktur sangat menentukan, mulai dari rapat redaksi sampai ke percetakan. Tujuan penyuntingan di redaksi yang merupakan tanggungjawab redaktur selain memperbaiki kalimat tapi juga menjaga agar isi naskah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan visi dan misi media. Redaktur harus mampu menjaga objektivitas berita agar layak siar dan laku dijual. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan para redaktur senior di majalah Girlfriend Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran redaktur tidak hanya menyangkut masalah teknis tapi juga nonteknis seperti kesamaan persepsi antara reporter dan redaktur. Dalam komunikasi dengan reporter, redaktur seringkali menemui hambatan seperti perbedaan pendapat dan kurangnya kerja sama. Redaktur tidak hanya menjaga unsur layak siar atau laku dijual tapi juga bagaimana menjaga agar mutu tulisan juga bermanfaat bagi masyarakat luas.; 8) **Ringkasan:** hasil penelitian yang dilakukan sejumlah mahasiswa STIKOM London School of Public Relations (2009) mengenai kegiatan jurnalistik di media massa menunjukkan bahwa kegiatan media terutama reporter di ujung tombak belum memperhatikan unsur hati nurani sebagai bentuk *self censorship* dalam pemberitaan., karena orientasi media lebih banyak bagaimana menarik pembaca sebanyak-banyaknya. Hal ini bisa dipahami, karena media massa adalah industri bisnis sehingga upaya mencari profit tentu saja menjadi signifikan. Persoalannya kemudian adalah, fungsi media massa “*to educate, to inform, to entertain, to influence*” akan menjadi terabaikan jika hanya menonjolkan upaya menarik pembaca semata. Unsur *self censorship* dan proses seleksi *editing* di media merupakan kata kunci untuk mengetahui niat tersembunyi dalam peliputan suatu peristiwa. Konsep ini sebenarnya dapat diperkuat dengan sejauh mana kepekaan dan *self censorship* wartawan sebagai ujung tombak media dalam liputan konflik. Konsep keseimbangan dalam pemberitaan

konflik dengan menyajikan kedua pihak secara berimbang tidak cukup hanya dengan menempatkan keduanya secara proporsional. Untuk itu perlu kepekaan dan *self censorship* wartawan dalam liputan apa pun termasuk liputan damai, agar masyarakat tidak dirugikan. Penelitian mahasiswa ini juga lebih menekankan peran redaktur dari sisi keredaksian, dan tidak menyentuh pentingnya kepekaan serta *self censorship* para redaktur dalam kegiatannya. Dengan peran sebagai *moral agent* atau *defining agency* dalam menegakkan kebenaran dan loyalitas kepada masyarakat, maka media perlu memperhatikan unsur *self censorship* dalam setiap denyut nadi kegiatan jurnalistik.

Konsep-Konsep Teoritik

1. *Self Censorship* media

Pada tingkatan individual, *self censorship* merupakan rambu-rambu atau tanda-tanda dan juga konsep diri atau pilihan nilai seseorang dalam menghadapi berbagai masalah. Namun, pada tingkatan organisasi atau masyarakat, terlebih lagi media massa, *self censorship* atau sensor diri adalah tindakan pengawasan yang dilakukan sendiri terutama dalam memenuhi berbagai kepentingan, yakni masyarakat dan pasar. Tindakan *self censorship* tidak hanya untuk menghadapi isu – isu sensitif, tapi juga dalam proses seleksi atau *editing* di media, kreativitas iklan, yang disebut juga *soft censorship*. Secara internal, media terus melakukan *self censorship* ini seperti pemilihan judul atau *headline* berita di surat kabar sebagai proses *editing*. Persoalan-persoalan yang timbul akibat pemberitaan di media menuntut perlunya *self censorship*. Dalam menghadapi tuntutan publik, media pun dengan kesadarannya (*awareness*) terus berupaya meningkatkan kualitas dengan cara menyensor isi media untuk mengurangi kontroversial atau untuk memenuhi selera publik dan industri. Para pemilik media khususnya, terus berusaha keras menerapkan *self censorship* secara sistematis dengan alasan kepentingan pasar. Meski dalam sistem pers liberal sekalipun, *self censorship* merupakan evidensi dalam proses seleksi (Chomsky & Herman, 1994).

Hubungan antara media, masyarakat, dan pemerintah merupakan bentuk *interlocking* yang saling mengikat untuk menjadi satu sistem. Jika muncul ketidakpuasan masyarakat terhadap pers, maka muncullah bentuk protes atau keluhan, karena ada sistem yang saling mengunci tersebut. Dengan demikian, bentuk perlawanan atau keluhan dari masyarakat dan pemerintah terhadap isi media dalam komunikasi ketiga tingkatan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi isi media. Beberapa faktor intrinsik pada pekerja media yang dapat mempengaruhi isi media, pertama adalah karakteristik wartawan serta latar belakang personal dan profesional; kedua, sikap personal wartawan termasuk nilai-nilai dan keyakinannya serta ketiga orientasi profesional dan konsep peran. Selain *level* individual yang akan mempengaruhi isi media, juga ada pengaruh rutinitas media, organisasi media, eksternal media dan ideologi, yang semua merupakan bagian dalam proses *self censorship* itu sendiri (Shoemaker&Reese, 2001).

Hubungan masing-masing *level* terhadap isi media pada hakikatnya merupakan refleksi sistem pers yang dipilih sebuah negara, sejalan dengan dengan sistem pemerintahannya. di negara tersebut. Pada setiap sistem ini juga akan mencerminkan kebebasan pers yang dianut, serta bagaimana *self censorship* menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan pers. Dalam sistem pers tanggungjawab sosial, misalnya, maka prinsip utama yang menjadi pegangan jurnalistik adalah: a) media seyogyanya menerima dan b) memenuhi dan menetapkan standar

tinggi atau profesional media antara lain informatif, kebenaran, ketepatan, objektivitas dan keseimbangan, c) media seyogyanya dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada, d) menghindari hal yang dapat menimbulkan kejahatan, kerusakan, ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik dan agama, e) mencerminkan kebinekaan masyarakat dan memberikan kesempatan sama untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak jawab, f) masyarakat dan publik memiliki hak untuk standar profesi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk kepentingan umum, g) wartawan dan media profesional bertanggungjawab terhadap masyarakat, majikan dan pasar (McQuail, 2005: 234)

Prinsip-prinsip dalam sistem pers juga merupakan pegangan dalam pelaksanaan sensor diri, sesuai dengan tujuan dan fungsi media massa. Setiap wartawan pada hakikatnya memiliki standar profesi dan model karir yang dapat mereka atur sendiri. Ia benar-benar ingin menjadi wartawan profesional, wartawan amplop, wartawan bodreks. Namun, bagi wartawan umumnya, sebenarnya pegangan moral merupakan alasan kuat untuk menggeluti profesi ini. Ada sembilan elemen yang harus dipenuhi oleh wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik secara profesional yakni sebagai berikut: a) wajib menegakkan kebenaran, b) loyal pada masyarakat, c) sebagai forum publik, d) disiplin dalam verifikasi liputan, e) menjaga kebebasan pers dari berbagai tekanan setiap liputan, f) pengawas independen terhadap berbagai bentuk kekuasaan, g) sajikan berita yang signifikan dan relevan, h) menyediakan berita yang komprehensif dan proporsional, h) mempertimbangkan kata hati atau hati nurani (Kovach&Rosenstiel, 2001: 12-13).

Dari uraian di atas dapat diringkas bahwa *self censorship* merupakan elemen utama dalam sistem pers tanggungjawab sosial, karena wartawan harus mempertimbangkan semua langkah kegiatannya untuk masyarakat.

2. Etika pers dan Kotak Potter

Konsep etika pers berkembang seiring dengan profesi jurnalistik itu sendiri. Kode etik media adalah pedoman yang menjadi pegangan wartawan, tetapi seringkali kurang memadai ketika berhadapan dengan persoalan moral yang sulit. Hal ini karena posisi wartawan dengan lima kewajiban yang melekat pada dirinya sendiri, yakni kewajiban kepada diri sendiri, khalayak, atasan, profesi dan masyarakat. Ini semua berhubungan dengan tuntutan media yang berkualitas yang pada gilirannya akan terrefleksi pada kebebasan pers itu sendiri. Kuncinya adalah kejujuran dalam melaksanakan tugas termasuk dalam peliputan dan investigasi.

Menurut Belsey&Chadwick (2005: 10-11) asumsi kode etik bukan sekadar kode etik itu sendiri secara harfiah yang memuat berbagai sanksi, bukan juga sejumlah aturan yang harus dipatuhi, tapi lebih merupakan prinsip atau komitmen mengenai baik-buruk atau salah-benar dalam masalah kemanusiaan yang dapat diterapkan dalam liputan yang objektif dan imparisial. Komitmen terhadap informasi berkualitas justru merupakan hakikat etika pers itu sendiri.

Kode etik media massa tidak dapat mengantisipasi semua persoalan moral, namun di sisi lain sering terjadi ketidakkonsistenan dalam menerapkan prinsip moral yang sudah ditetapkan. Ralph Potter, profesor Harvard Divinity School, menyusun model empat kuadran untuk menguji problem etika yang disebut Kotak Potter, yang masing-masing memuat satu kategori pertanyaan (Vivian, 2008: 630-634). Kategori ini dapat membantu menjelaskan isu dan menghasilkan pandangan moral sebagai pegangan *self censorship* yang dapat dibenarkan.

Berikut ini empat kuadran dari Kotak Potter, yakni: 1) kuadran situasi (*situation*); fakta atau isu yang ditentukan lebih dulu dibahas. Di sini tahapan keputusan dalam pemilihan isu untuk disiarkan media. Keputusan pada tahapan ini lebih bersifat redaksional, apakah sudah layak siar, di samping memperhatikan agenda media dan kepentingan masyarakat; 2) kuadran nilai (*values*): jika keputusan pada kuadran pertama telah disetujui, maka editor dan reporter mengidentifikasi nilai dan manfaat yang mendasari semua pilihan yang tersedia. Pada kuadran ini proses dilakukan dengan menyusun nilai positif dan negatif terhadap isu yang disiarkan tersebut.; 3)kuadran prinsip (*principles*): untuk lebih menguatkan nilai pada kuadran 3 untuk kepentingan publik. Di sini berlaku pertimbangan sangat mendasar yakni loyalitas pada masyarakat (*citizens*) ; 4) kuadran loyalitas (*loyalties*): di sini pertimbangan adalah untuk memenuhi berbagai kepentingan, apakah pemberitaan itu untuk memenuhi kepentingan masyarakat, *editor*, pemilik modal atau untuk diri sendiri.

Kotak Potter tidak menyediakan jawaban, tapi hanya sebuah proses untuk mengkaji elemen-elemen utama dalam persoalan etika dan *self censorship*. Hal ini karena Kotak Potter berfokus pada aspek moral, misal penyebutan nama korban perkosaan apakah bijak jika khalayak justru tersinggung sehingga mereka akhirnya tidak mau lagi membeli koran tersebut.

Dengan munculnya berbagai efek yang tidak diinginkan dari isi media, seperti tayangan kekerasan di TV terhadap anak-anak, maka etika media dan *self censorship* menjadi pegangan wartawan dalam memilah-milah informasi yang disajikan di media sesuai dengan fungsi media massa. Apalagi, banyak isu sensitif yang dapat menjebak wartawan dengan alasan untuk kepentingan media atau tuntutan masyarakat. (Perry, 2002: 221)

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan *meta-analysis* untuk menganalisis hasil-hasil penelitian yang ada berdasarkan tujuan dan pertanyaan penelitian yang dikemukakan. Meta-analysis adalah teknik penelitian formal di mana peneliti mengkaji temuan-temuan dari hasil-hasil kajian yang sudah ada yang diperkuat dengan kajian pustaka (Perry, 2002: 52). Meta-analysis ini juga disebut penelitian lanjutan (*secondary research*) dengan memanfaatkan data dari hasil penelitian sebelumnya, buku, dokumen. Pendekatan penelitian semacam ini masuk dalam paradigma kualitatif. Menurut Moleong (2000: 243), sumber informasi yang paling penting dalam penelitian ini adalah hasil penelitian lainnya atau sebelumnya, serta buku-buku literatur, lalu dilakukan penelaahan dengan teliti dan diteliti ulang, kemudian dipilah untuk menjadi bahan analisis. Semua bahan informasi itu berasal dari kepustakaan, buku dan dokumen, maka data yang dikumpulkan juga bersifat kualitatif.

Sumber informasi yang menjadi unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini 1) dokumen pengaduan yang masuk ke Dewan Pers 2001 – 2007 yang dianalisis dengan menggunakan instrumen Kotak Potter (Vivian, 2008: 634) untuk mengkaji elemen-elemen dalam proses penerapan etika pers, *self censorship* dan hati nurani di media, 2) hasil diskusi kelompok wartawan Indonesia –Australia di Canberra dan Sydney 9-11 November mengenai konsep *self censorship*.

PEMBAHASAN

Proses *self censorship* ini terlihat dari sejumlah kasus yang masuk ke Dewan Pers dan hasil diskusi dialog bilateral media Indonesia – Australia, semuanya. dianalisis dengan menggunakan instrumen empat kuadran Kotak Potter. Pembahasan dilakukan untuk menggambarkan bagaimana refleksi nilai-nilai *self censorship* di media setelah berita itu dimuat dimedia massa.

1. Berikut ini 19 pengaduan masyarakat terhadap liputan media massa yang masuk ke Dewan Pers.

Tabel 1
Laporan pengaduan

No/tahun	Masalah Pengaduan	Rekomendasi Dewan Pers	Interpretasi
1/2001	YLKI terhadap Media Indonesia terhadap pemberitaan Media Indonesia berjudul “Wakil Ketua YLKI Terima Rp6 Miliar Dana untuk Sosialisasi Kenaikan Tarif Dasar Listrik”. Pihak YLKI menyatakan judul berita tersebut telah merusak dan mencemarkan nama baik YLKI dan membentuk opini publik bahwa seolah-olah YLKI telah menerima dana sosialisasi kenaikan tarif dasar listrik	Berdasarkan prinsip jurnalistik , berita Media Indonesia yang diadakan memenuhi kriteria standar jurnalistik serta tidak mengandung pelanggaran kode etik yang signifikan, tidak ditemukan niat sengaja oleh Media Indonesia untuk mencemarkan nama baik YLKI. Judul berita kurang sinkron dan cenderung dapat mengaburkan isi.	Dana tersebut bukan diterima oleh YLKI melainkan Visi Anak Bangsa yang seorang pendirinya adalah Wakil Ketua YLKI. Media Indonesia langsung menyebutkan nama penerima dana, meski wakil ketua yang dimaksud bukan berarti YLKI. Peristiwa ini masuk dalam kuadran tiga (prinsip) dengan suatu pertimbangan untuk kejelasan informasi.
2/2002	FPPU terhadap Majalah Sabili (27/6) dengan judul tulisan “Selamatkan IAIN dan Liberalisme dan Amoral”, “Membongkar Tabir Kesusatan LDIF”. Pihak FPPU menganggap berita itu mengandung kekerasan dan dapat memecah ukhuwah Islamiyah.	Gaya pemberitaan menunjukkan sensasional dan opini media terhadap objek berita. Dan cenderung menghakimi sumber.	Dalam menghadapi situasi yang menyudutkan satu pihak merupakan pilihan berat bagi media. Namun Sabili tidak menggunakan berbagai elemen yang menguatkan media ini menurunkan masalah IAIN dan liberalisme. Sebagai media dakwah, Sabili seyogyanya memikirkan manfaat tulisan tersebut juga bagi umat Islam dan ini jelas merugikan masyarakat. Ini berarti tidak satu kuadran Potter pun yang dijadikan pegangan.
3/2003	Staf Khusus Wakil Presiden terhadap Berita Koran Tempo: “Polisi Bantah Menangkap Anak Wakil Presiden”. Tempo dianggap telah melakukan pembunuhan karakter dan penyiaran fitnah dengan sumber anonim.	Media Tempo telah melakukan <i>check</i> dan <i>recheck</i> , dan telah berupaya menerapkan prinsip jurnalisme secara bertanggung jawab. Koran Tempo berusaha melakukan konfirmasi dan tidak menulis isu secara sensasional atau	Pertimbangan untuk menyiarkan berita isu narkoba adalah berita yang menyangkut kepentingan luas. Dengan demikian, Koran tempo pada berita ini telah menepati pertimbangan semua elemen Kotak Potter dengan

<p>4/2003</p>	<p>Letjen TNI Djadja Suparman terhadap The Jakarta Post, Jawa Pos, Radar Bali, Sumatera Ekspres, Pelita dan Rakyat Merdeka, dengan judul antara lain "Saat terjadi Leakan 12 Oktober ada dua jenderal di Bali". Dikatakan bahwa keenam surat kabar telah menyiarkan berita bohong karena Suparman tidak ada di Bali saat itu, dan dianggap telah mencemarkan nama baiknya.</p>	<p>mendramatisasi isu, tercermin pada pilihan judul dan isi berita.</p> <p>Berita tidak seimbang karena tidak ada konfirmasi dari subjek berita, dan dianggap telah melanggar Kode Etik Jurnalistik. Berita ini memang sangat ditunggu masyarakat luas, namun media harus menyajikan fakta dengan nilai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>berupaya menegakkan prinsip kebenaran dan untuk kepentingan pembaca.</p> <p>Berita ledakan bom di Bali pada 12 Oktober 2002 merupakan berita terhangat dan pada situasi ini media pantas memburunya sebagai berita dengan <i>news value</i> sangat tinggi dengan posisi kuadran 4. Namun, berita ini tidak memenuhi elemen kuadran 2,3, karena kurang mendapat sumber kredibel.</p>
<p>5/2003</p>	<p>Ir Fadel Muhammad terhadap Harian Limboto Express, Gorontalo dengan judul berita antara lain "Gubernur serobot proyek subsidi BBM transmigrasi", "Kalau Fadel cemari partai, Golkar tarik dukungan", "Fadel, Amir dan Ismed dalang penyerangan ke LE". ,</p>	<p>Limboto Express telah melakukan pelanggaran mengenai kasus sengketa, tidak berimbang, hanya fokus pada pencitraan buruk Gubernur Fadel Muhammad.</p>	<p>Pertimbangan media memuat berita sengketa yang berarti mengandung nilai konflik , lebih menekankan pada unsur kepentingan media untuk profit tanpa memperhatikan nilai kebenaran, bahkan menjurus untuk merusak citra orang lain. Ini berarti nilai elemen Kotak Potter belum digunakan dalam seleksi isu atau <i>self censorship</i> media .</p>
<p>6/2004</p>	<p>PT TOBA PULP LESTARI TBK atas pemberitaan Majalah Berita Mingguan Tempo, Rubrik SELINGAN dengan 3 artikel berjudul "Selebar Ulos yang Sobek", "Royan di Bona Ni Pasogit", "Kisah Si Pongah dan Lapo Tuak".</p>	<p>Wartawan telah beruaha untuk menyediakan informasi secara komprehensif dengan mengumpulkan data dari berbagai pihak, namun sayangnya sumber berita tidak dikutip seutuhnya, data tidak akurat, sehingga menimbulkan keraguan dan dampak luas bagi masyarakat dan kerugian bagi perusahaan tersebut.</p>	<p>Media memutuskan menyiarkan peristiwa ini karena menyangkut jangka panjang kepentingan masyarakat, sehingga publik mendapat gambaran lengkap mengenai dinamika perusahaan tersebut. Nilai prinsip dalam kuadran 3 Kotak Potter menjadi pegangan media dalam memutuskan penyebaran informasi tersebut.</p>
<p>7/2004</p>	<p>Ir Laksamana Sukardi atas judul-judul berita: "Laksamana, Kenapa Harus Kabur" di Majalah Trust (27/9), "Laks Diisukan Kabur ke LN di Harian Nusa (24/9), "Laks. Pantas Ditangkap" di Harian reporter (28/9), "Dikhawatirkan Kabur ke Luar Negeri Jaksa Agung Diminta Mencekal Laksamana" di Harian Rakyat Merdeka (24/9), "Sekar Telkom Minta SBY Cekal Laks" di Harian Indo Pos (29/9).</p>	<p>Media telah melakukan kesalahan dalam pengumpulan data dengan tidak melakukan konfirmasi narasumber sehingga yang terjadi adalah pencemaran nama baik.</p>	<p>Nama Laksamana adalah unsur popularitas yang menjadi nilai berita tinggi. Namun sayang tidak satu elemen dalam Kotak Potter yang dijadikan pegangan dalam memutuskan pemuatan berita tersebut.</p>

8/2004	PT Jamsostek atas Pemberitaan Majalah Berita Mingguan Tempo edisi 8-20 Oktober 2004 dengan judul SALAH PARKIR DANA JAMSOSTEK	Laporan investigatif ini cukup komprehensif, penting dan perlu diketahui masyarakat luas. Dewan Pers memberikan penghargaan tinggi kepada majalah berita mingguan Tempo yang berhasil membongkar skandal untuk kepentingan umum.	Pertimbangan pemuatan kasus korupsi ini penting diketahui publik, dan ini merupakan elemen dalam kuadran 4 yang menjadi pertimbangan media untuk melakukan investigasi dana Jamsostek.
9/2005	PT RAJA GARUDA MAS terhadap Majalah Forum keadilan dengan judul “ Kredit Macet: Masuk ke Lubang yang Sama”, “Adu Lihai di Gedung Bundar”, “Kepak Sayap Raja Garuda Mas”	Laporan tidak seimbang, dengan mengutip sumber seorang karyawan, sehingga merugikan nama baik.	Pertimbangan untuk memuat berita yang belum <i>clear</i> merupakan bentuk pengabaian <i>self censorship</i> dalam kuadran Kotak Potter.
10/2005	Hilman K Nurakhman selaku Kuasa Lisa Lukitawati dan Fia Djajadiningrat terhadap 11 media	Dewan Pers tidak menemukan niat jahat dalam pemberitannya yang secara sengaja dilakukan untuk mencederai nama baik, namun belum didasarkan pada profesionalisme kerja jurnalistik dalam Kode Etik Jurnalistik.	Dalam mempertimbangkan pemuatan suatu peristiwa meski tidak dengan niat jahat, namun efek nya seperti merugikan nama baik seseorang merupakan hal yang perlu jadi acuan dalam empat Kotak Potter. Namun ini terabaikan, sehingga media mau tidak mau harus memuat hak jawab sebagai imbangannya .
11/2005	Des Alwi terhadap Harian Ambon Ekspres (14/5) dengan judul “Warga Banda Pertanyakan Dana Reboisasi Rp 1,2 miliar”, Usut Dana Banpres di PT Pala banda, Delapan Tahun Kerjasama Kas Daerah Pemda Maluku Kosong”, “Tantang Taruhan Lima Miliar: Soal Dua jembatan di Banda”	Berita ini tidak menggunakan prinsip akurasi, keseimbangan dan kejujuran sehingga merusak nama baik Des Alwi. Ambon Ekspres tidak melakukan konfirmasi, hanya merupakan <i>newstalking</i> yang kurang menggali fakta.	Pertimbangan penyajian berita berdasarkan situasi yang ada tanpa konfirmasi sumber dan manfaat berita, berarti pengabaian elemen Kotak Potter sebelum memutuskan pemuatan berita di media
12/2005	Bupati Muba Ir H. Alex Noerdin terhadap Harian Transparan dengan judul antara lain “ Polda Serious Tangani Alex Nurdin”	Dewan Pers menilai tidak ada niat jahat dalam pemberitaan dugaan korupsi di Kabupaten Muba dan media juga telah memberitakan hal yang positif dan baik tentang Kabupaten Muba. Hanya saja menurut Dewan Pers, redaksi Transparan perlu memperhatikan asas kepatutan dan keseimbangan dari berita-berita yang ada.	Elemen kuadran 1 Kotak Potter yakni unsur situasi merupakan dasar pemberitaan ini karena kasus korupsi selalu merupakan berita penting di media. Namun, pertimbangan dalam kuadran 3 yakni prinsip bahwa informasi itu tidak akan mencemarkan nama baik orang lain kurang diperhatikan media.
13/2006	Media PW_Kepri Komunitas dan anggota DPR/MPR RI dari Provinsi Kepulauan Riau Hendry Frankim dengan judul “ Walikota itu	Berita ini tidak memenuhi standar jurnalistik 5W dan 1H sehingga diragukan keakurasiannya. Dengan judul tersebut, jelas-jelas sensitif	Dengan kepentingan apa pun kalau sudah mengandung unsur SARA dan sensitivitas, maka elemen empat Kotak Potter menjadi syarat utama.

	keturunan Cina tapi bodoh”	dan sarat dengan kandungan SARA.	Dengan pemuatan berita yang langsung menjerus nama baik seseorang dengan kepentingan tertentu, maka media telah mengabaikan unsur <i>self sencorship</i> secara hakiki.
14/ 2006	Asep Rahmatan Kusuma terhadap Majalah Gatra mengenai laporan utama dari sumber yang tidak jelas serta pemuatan foto tanpa ijin.	Dewan Pers Tidak menemukan pelanggaran apa pun terhadap Kode Etik Jurnalistik dan menyarankan agar Majalah Gatra berhati-hati dalam memilih narasumbernya demi kredibilitas	Pertimbangan pemuatan berita sudah menggunakan prinsip pada kuadran 3 Kotak Potter, artinya sepanjang berita memuat informasi apa adanya dan bermanfaat bagi khalayak maka media akan menyajikannya dengan komprehensif.
15/2006	PT Newmont Pacific Nusantara terhadap SCTV dalam tayangan SIGI “ Gejolak Tambang di Bumi Sumbawa” (23/4)	Tayangan Sigi 30 menit “Gejolak Tambang di Bumi Sumbawa” dinilai merupakan laporan jurnalistik yang cukup proporsional, meski ada indikasi menggiring persepsi penonton secara tidak berimbang terhadap kinerja perusahaan itu. Tidak ditemukan upaya sengaja untuk memanipulasi data dengan narasumber yang berimbang.	Pertimbangan penyiaran tayangan tersebut memenuhi elemen kuadran 3 Kotak Potter karena secara prinsip berita telah memenuhi persyaratan, yakni seimbang dan menyangkut kepentingan umum.
16/2006	Menteri Agama M.Maftuh Basyuni terhadap tabloid Investigasi (17-30/8) berjudul “ DAU Mengalir Sampai Menteri Agama” dan Metro TV.	Dewan Pers telah memberikan teguran terbuka kepada Metro TV dan menilai tv tersebut telah bertindak tidak etis dan tidak menunjukkan sikap jurnalis yang profesional.	Pertimbangan pemuatan berita dengan alasan apa pun kalau hanya untuk menjatuhkan seseorang, berarti telah melanggar hati nurani wartawan itu sendiri.
17/2006	Bambang Wisudo terhadap Kompas online dengan judul “Satpam tidak Menyandera dan Menganiaya Wartawan”	Tidak ditemukan pelanggaran Kode Etik atas pemberitaan tersebut. Untuk itu Dewan Pers menyarankan agar persoalan antara pengadu dan teradu agar diselesaikan secara internal dengan mengedepankan musyawarah-mufakat	Pertimbangan pemuatan berita sudah mengscu elemen dalam kuadran1 yakni situasi yang mendorong media untuk menyiarkan kasus secara <i>online</i> , demi kepentingan umum juga.
18/2007	Irawan Santoso dkk terhadap Majalah Forum Keadilan yang secara sepihak memecat mereka sebagai wartawan Forum.	Dewan Pers menilai sikap Pemred majalah terebut yang menolak hadir untuk mengklarifikasi pengaduan sebagai tindakan yang tidak menghargai ketentuan sebagai tindakan yang tidak menghargai ketentuan UU no 40/1999.	Dari sisi elemen kuadron Kotak Potter, hak jawab dan hak tolak merupakan refleksi kesimbangan antara kedua pihak yang bertikai, dan ini harus dipatuhi oleh kedua belah pihak juga. Sayangnya, kasus ini sepihak sehingga terjadi ketidakadilan yang dirasakan pihak yang merasa dirugikan hanya karena ketidakjelasan informasi.

19/2007	Hinca Panjaitan terhadap koran mingguan Orbit (Juli) dengan judul “ Sejumlah Pejabat Pemrosu Miliki Istri Simpanan”, “Skandal Seks Gubernur Bayangan Bikin gejer”.	Berita tidak berdasarkan fakta akurat, dan media Orbit juga menolak memberikan jawaban. Dengan demikian bisa ditafsirkan bahwa berita tersebut merupakan rekayasa wartawan	Pemberitaan mengenai kehidupan pribadi seharusnya menjadi pertimbangan ketat dalam menentukan agenda media. Dalam konteks ini elemen kuadran Kotak Potter tidak membenarkan suatu pemberitaan bohong, karena sangat melanggar kaidah moral.
<p>Ringkasan interpretasi</p> <p>Kotak Potter adalah instrumen sederhana untuk melihat apakah kepatuhan pada <i>self censorship</i> media dengan berpegang pada hati nurani dan kode etik menjadi penting, karena bagaimana pun sulit sekali untuk mengukur internal wartawan. Dari keseluruhan kasus yang masuk ke Dewan Pers menunjukkan sebagian besar media melanggar Kotak Potter dengan alasan kepentingan media. Dari seluruh jalan pemikiran interpretasi mengenai refleksi <i>self censorship</i> yang digunakan dalam Kotak Potter menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik atau jurnalistik profesional lebih banyak karena kurang memperhatikan etika atau standar moral sebagai pegangan utama dalam <i>self censorship</i> wartawan dan media. Artinya, pilihan pelanggaran jurnalistik yang dilakukan media massa baik secara sengaja atau tidak sengaja, untuk kepentingan sendiri, kepentingan media, atau kepentingan pihak lain, sebenarnya karena lemahnya unsur <i>self censorship</i>. Wartawan profesional dengan <i>self censorship</i> kuat sebenarnya sangat memahami arti pelanggaran dengan menggunakan sumber anonim, fakta palsu atau wawancara imajiner, tanpa pengecekan atau konfirmasi narasumber, dengan segala akibatnya bagi masyarakat.</p>			

2. Hasil diskusi kelompok (focus group discussion—FGD) wartawan media Indonesia – Australia mengenai *self censorship* dalam Bilateral Inter Media Dialog—BIMD-- di Canberra dan Sydney, 9-11 November 2010. Peserta diskusi adalah Freddy H. Tulung (Kepala pejabat Kementerian Kominfo), Bambang Harymurti (Pemred Majalah Tempo, Eddy Utama dan M.Noeh Hatumena (LKBN ANTARA), Artini (dosen STIKOM London School or Public Relations), Insany Syahbarwaty (wartawan TV MNC Ambon), Warief Basorie (Lembaga Pendidikan Pers Dr.Soetomo), Gde Talgunadi (wartawan Majalah Travel Bali), Yusuf Rauf (Harian Fajar Makassar), Sylvia Malau dan Fransisca Sitompul (Direktorat Diplomasia, Kementerian Luar Negeri Indonesia), Shaun Brown dan Mark Cummins (Special Broadcasting Service –SBS), Julia Thoener Australian Broadcasting Corporation),

“...bagi wartawan Australia, masalah self censorship bukan masalah yang perlu dibahas lagi. Hal ini karena secara profesional, self censorship sudah melekat pada profesi wartawan itu sendiri, sehingga bila terjadi tuntutan maka urusannya langsung di pengadilan. Wartawan di negeri kangguru ini umumnya dari latar belakang pendidikan yang beragam, namun untuk menjadi wartawan harus melewati pendidikan kewartawanan sebelum benar-benar menjalankan tugas jurnalistik. Prinsip pemberitaan yang dianut benar-benar harus memenuhi kaidah jurnalistik seperti harus berimbang dengan cara melaporkan apa adanya. Jika ada tuntutan atau persaingan antarmedia, maka hal itu merupakan tugas media untuk melakukan pengawasan sosial. Karena itu, media Australia sangat percaya pada kemampuan seleksi nurani para wartawannya ketika membuat sebuah berita. “Reporter akan bertanggungjawab

sampai kemana pun, jika karyanya dianggap benar. Tetapi bila merasa beritanya memang salah, maka dengan elegan akan mengundurkan diri. Self censorship hanyalah sebuah bentuk pengingat bagi wartawan atau siapa pun yang akan melawan arus kemanusiaan dan garis moral. Sensor hanya dibutuhkan untuk menghadapi isu-isu sensitif. Di sisi lain, self censorship juga pada intinya adalah bentuk pegangan moral atau kebijaksanaan yang dibutuhkan khalayak. Media sensor sangat diperlukan ketika wartawan menghadapi masalah seks, kekerasan dan rasisme. Jadi, sensor bukanlah alat untuk menyerang lain.”

Perbedaan penerapan *self censorship* antara media Indonesia dengan media Australia dapat dipahami sebagai perbedaan sistem yang berlaku serta kepemilikan media serta komitmen perusahaan media terhadap wartawannya. Jika iklim pers di era reformasi seperti sekarang ini Indonesia dapat membuat siapa saja bisa mendirikan perusahaan media tanpa memikirkan profesional wartawan, sementara di Australia kepemilikan media hanya ada tiga perusahaan besar dan semua media di negeri ini bersaing sehat. Sama dengan Indonesia yang mempunyai Dewan Pers yang akan mengawasi kegiatan media, bentuk *self censorship* lainnya di Australia adalah kehadiran lembaga pengawas seperti Australian Communication and Media Authority (ACMA) sebagai regulator penyiaran untuk radio dan televisi di Australia. Namun di sisi lain, masyarakat di negeri kangguru ini mempunyai peluang besar sebagai *media watch* yang dapat melaporkan apa saja bentuk penyimpangan yang dilakukan media. Kesadaran akan hak informasi publik sudah melekat kuat pada masyarakat Australia. Sebaliknya di Indonesia kesadaran *media watch* belum sejalan dengan kesadaran akan hak informasi publik yang menjadi hak masyarakat itu sendiri karena tingkat melek media juga masih rendah sesuai dengan latar belakang penduduk itu sendiri.

Jalan pikiran yang dapat ditarik dari diskusi kelompok media Indonesia dan Australia di atas *self censorship* yang diterapkan dengan mengacu Kotak Potter merupakan suatu tahapan atau proses penilaian dan *awareness* terhadap pelaporan suatu peristiwa sesuai dengan fungsi media.

Kovach (2001) dengan sembilan elemen dasar bagi media massa secara sederhana sudah menunjukkan bahwa berita bukan sekadar pelaporan suatu peristiwa berdasarkan fakta yang dikemas dalam rumus 5W dan 1 H. Berita sebagai suatu wacana sekaligus menyimpan suatu agenda tersembunyi untuk berbagai kepentingan. Agenda media atau keberpihakan media terhadap isu-isu penting dalam masyarakat hendaknya dapat juga menjadi suatu bentuk tanggungjawab sosial media kepada masyarakat. Sistem tanggungjawab sosial menyiratkan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi media massa di samping konsep pasar yang memiliki peran lebih besar dalam menentukan bentuk dan isi media. Khalayak pun mempunyai harapan tertentu pada media massa, dan inilah yang mendorong munculnya reaksi atau keluhan karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dalam konteks ini persaingan media, kondisi internal media, serta tuntutan masyarakat merupakan pegangan dalam menentukan prinsip.

PENUTUP**Kesimpulan**

Meskipun wartawan pada dasarnya mempunyai banyak kebebasan dalam menentukan apa yang akan dilaporkan dan cara memberitakannya, namun kerja media massa merupakan karya kolektif. Apa yang dihasilkan seorang wartawan merupakan karya bersama. Pada sisi ini, peran *self censorship* media yang terbangun dalam proses *gatekeeping* di media akan menjadi kekuatan efektif dalam menjalankan fungsi sosial media.

Self censorship dan tanggungjawab sosial merupakan bentuk *interlocking* dalam diri seorang wartawan dengan lingkungan masyarakat dengan segala nilai yang ada. *Self censorship* ini bukanlah suatu bentuk pengekangan diri, tapi justru membuat wartawan mempunyai persepsi sendiri terhadap perannya yakni pada media atau organisasi tempat dia bekerja yang mengharuskannya juga memikirkan profit, tuntutan masyarakat yang menginginkan berita-berita yang berkualitas, pemerintah dengan segala kebijaksanaannya.

Saran

Implikasi hasil penelitian secara teoretis adalah sistem *interlocking* antara pemerintah, media dan masyarakat serta industri bisnis sekaligus sebagai rambu-rambu dalam setiap kegiatan jurnalistik. Dalam praktiknya, implikasi *self censorship* dan tanggungjawab sosial media massa adalah elemen profesional.

Daftar Pustaka

- Belsey, Andrew & Ruth Chadwick. *Ethical Issues in Journalism and The Media*. Routledge, New York: 2005
- Chomsky, Noam & Edward Herman. *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*, 1994
- Kovach, Bil & Tom Rosenstiel. *The Elements of Journalism. What News aq2people Should Know and The Public Should Expect*. Three Rivers Press, New York: 2001
- Littlejohn, Stephen W & Karen A. Poss. *Human Coomunication*. Thmson Wardsworth, New York: 2008
- Perry, David K. *Theory and Research in Mass Communication. Context and Consequences*. 2002
- McQuail, Dennis. *Mass Communication Theory*. London, Sage Publishing: 2005
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2000
- Straubhaar, Joseph & Robert Larose. *Media Now*. Thomson Wadsworth, New York: 2000.
- Sukardi, Wina Armada. *Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik*. Dewan pers: Jakarta, 2007.
- Rapor Wartawan Indonesia. Dewan Pers Ami Global Media, Jakarta: 2007
- Shoemaker, Pamela J & Stephen D. Reese. *Mediating the Message Theories of Influences on Mass media Content*. New York, Longman Publishing Group: 2001
- Vivian, John. *Teori Komunikasi Massa, terjemahan*. Jakarta, Kencana Group: 2008
- Diterima melalui email pada Mon, 12/13/10.

Perspektif Fungsional Pada Pembentukan Keputusan Kelompok Randy Hirokawa & Dennis Gouran

Apa yang dikemukakan oleh kedua penulis tersebut mengenai fenomena individu dalam suatu kelompok, kiranya belum merupakan sebuah teori namun masih sebatas perspektif. Belum ada upaya penghubungan konsep-konsep yang dikemukakan dalam perspektif tersebut.

Menurut perspektif tersebut, maka setiap komunikasi yang dilakukan anggota kelompok dalam proses komunikasi guna terbentuknya keputusan kelompok, itu mempunyai fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi tersebut terdiri dari : 1) fungsi *promotive*; 2) fungsi *disruptive*; 3) fungsi *counteractive*. Dengan fungsi ini, maka ini berarti pula bahwa setiap orang yang berkomunikasi dalam kelompok, pada dasarnya individu dalam kelompok itu sedang berupaya memainkan peran yang bervariasi pada tiga fungsi sebelumnya.

Individu yang memerankan fungsi *promotive*, ini berarti individu tersebut merupakan individu yang mendukung topik-topik yang diangkat dalam diskusi kelompok. Sementara individu yang memerankan fungsi *disruptive*, adalah individu yang mengganggu proses pengambilan keputusan dalam kelompok. Sedang Individu yang memerankan fungsi *counteractive* yaitu individu yang berupaya mengendalikan jalannya proses pengambilan keputusan dengan jalan selalu berupaya menyadarkan anggota kelompok lainnya akan isu yang menjadi topik utama dalam diskusi. (Disajikan oleh Hasyim Ali Imran).